

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Irwansyah & Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, 1999.
- Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000.
- Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Bandung: Alumni, 2006.
- M. Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (6th ed.), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Bandung: Eresco, 2018.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Pawoto Wignjosoebroto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah) Cet I*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermesa, 1983.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMMPress, 2020.
- Sajipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- _____ & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Sulistiyowati Irianto, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm. 15-18.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan: Sofmedia, 2010.
- Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

JURNAL

- Elviana Sagala, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 03 No. 01, Maret 2015.
- Harsono I, et.al, *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer*, *Notarius*, Vol. 12 No. 2 (2019).
- Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, *Jurnal Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009.
- Nadirah I, *Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2021). DOI: [10.55357/is.v2i2](https://doi.org/10.55357/is.v2i2).
- Richardo Purba, *Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Diajukan Oleh Pihak Kreditor Kepada Debitur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Tommy Leonard, Yolanda C. Irianda Panjaitan, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,

Jurnal Hukum IBLAM LAW REVIEW Universitas Prima Indonesia, Vol. 3 No. 3 (2023). DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.259>.

Tommy Leonard, Yolanda C. Irianda Panjaitan, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal Hukum IBLAM Universitas Prima Medan*, Vol. 3 No. 3 (2023). DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.259>.

Yuhelson D.Y., et.al, *The Priority Distribution Of Wealth The Debtor's Bankrupt (Boedel Bankruptcy) Towards Separatist And Preferential Of Creditor Based On Principles Of Fairness And Legal Security, The Southeast Asia Law Journal (SALJ)*, Vol. 2 No. 1 (2016).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

_____, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

_____, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Pengadilan Niaga, Putusan Nomor 90/Pdt.PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

LAINNYA

Irna Nurhayati, *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)*, Fakultas Hukum UGM: *Mimbar Hukum Majalah Berkala* No: 32/VI/1999.

Rendy Heryadiansyah, *Perlindungan Hukum Tertanggung Terhadap Perusahaan Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Skripsi) 2017. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa